

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Pembahasan mengenai kekerasan terhadap perempuan di Mesir sudah banyak dikaji oleh beberapa peneliti. Penelitian terdahulu terkait dengan program dan kebijakan UN Women di Mesir, dilakukan oleh Aat Rif'ati Zulfa dalam skripsinya yang berjudul “Upaya United Nations Women Dalam Penghapusan Diskriminasi Terhadap Kaum Perempuan Di Mesir Pasca Revolusi Mesir 2011”.¹⁴ Dalam skripsinya Zulfa menemukan bahwa konstitusi yang berlaku di Mesir dari era sebelum dan setelah Revolusi 2011 belum mampu menjamin kesetaraan gender dan masalah diskriminasi bagi perempuan dan laki-laki. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai laporan dan survey yang ada bahwa Mesir masih menduduki posisi yang tidak cukup baik dalam kesetaraan gender. Namun, UN Women yang berfokus pada permasalahan kesetaraan gender hadir dalam upayanya menghapuskan diskriminasi terhadap kaum perempuan di Mesir dengan membangun rezim kesetaraan gender melalui gender mainstreaming yang dilaksanakan dalam tiga fokus program. Pertama, pembentukan *Egyptian Women Charter* atau Piagam Perempuan Mesir dan *Egyptian Women's Union* atau Serikat Perempuan Mesir. Kedua, dalam upaya UN Women mengakhiri kekerasan terhadap perempuan di Mesir dengan menciptakan suatu program besar bernama “*Safe Cities Programme*”. Ketiga, respon UN Women dalam partisipasi ekonomi perempuan yang mempunyai dua sub program yaitu, *Salheya* (Kursus pelatihan untuk menerapkan kesetaraan gender dalam sistem manajemen perusahaan) dan program *Pro-Poor Horticulture Value Chains In Upper Egypt (Salasel)* guna meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor petani kecil dan pekerja pertanian perempuan. Perbedaan skripsi Zulfa dengan penulis yaitu terletak pada fokus permasalahan dan periode waktu, penulis

¹⁴ Aat Rif'ati Zulfa. 2017, *Upaya United Nations Women Dalam Penghapusan Diskriminasi Terhadap Kaum Perempuan Di Mesir Pasca Revolusi Mesir 2011*, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hal. 87-93. <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/12693>

berfokus pada kekerasan terhadap perempuan Mesir saja dan menambahkan periode waktu antara tahun 2017 sampai 2021.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Mariam Saleh dalam tesis magisternya dengan judul “The Role Of Online And Social Media In Combating Sexual Harassment In Egypt”.¹⁵ Tesis ini membahas bagaimana pelecehan seksual di Mesir dapat dilawan dan dicegah melalui metode komunikasi pembangunan menggunakan online dan media sosial. Berdasarkan Model Ekologi Sosial atau *Social Ecological Model* untuk memerangi pelecehan seksual, serta menggunakan studi kasus *HarassMap* sebuah LSM Mesir yang bekerja untuk memerangi pelecehan seksual melalui online dan media sosial. Temuan studi menunjukkan bahwa media online dan sosial dapat digunakan melalui kampanye komunikasi partisipatif fungsional, mengikuti pendekatan perubahan sosial dan mobilisasi sosial. Perbedaan yang terdapat pada tesis Mariam dengan penulis yaitu Mariam menggunakan studi kasus dan peran online dan media sosial dalam memerangi pelecehan seksual di Mesir, sedangkan penulis berfokus pada upaya UN Women dalam mengatasi tindak kekerasan terhadap perempuan Mesir.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Naela Elmehrek yang menulis tesis dengan judul “Egyptian Teachers Conceptions Of Sexual Harassment Prevention Within Schools And Through Education”.¹⁶ Tesis Naela membahas mengenai guru di Mesir dan *Sexual Harassment Prevention* (SHP) atau Pencegahan Pelecehan Seksual di sekolah untuk melibatkan peran mereka, lingkungan di sekitar mereka, dan ide-ide mereka menuju masa depan (SHP). Penelitian Naela menunjukkan bahwa kesadaran guru tentang pelecehan seksual tidak memiliki hubungan dengan masalah ketidaksetaraan gender yang lebih luas. Guru menganggap peran mereka dalam SHP sebagai tanggung jawab menjaga daripada langkah menuju perubahan sosial. Dapat dilihat perbedaan antara penelitian penulis dengan tesis ini, Naela dalam penelitiannya melihat peran guru dalam pencegahan pelecehan seksual di

¹⁵ Mariam Saleh. 2018, *The role of online and social media in combating sexual harassment in Egypt*, Cairo: The American University in Cairo, hal. 4-5 <https://fount.aucegypt.edu/etds/436>

¹⁶ Naela Elmehrek. 2021, *Egyptian Teachers' Conceptions of Sexual Harassment Prevention Within Schools and Through Education*, Finlandia: Universitas Oulu, hal. 115-116. <https://core.ac.uk/download/475361075.pdf>

sekolah dan melalui pendidikan. Meski sama-sama memilih tempat penelitian di Mesir tetapi Naela mempersempit ruang lingkupnya di lingkungan sekolah, sedangkan penulis memiliki ruang lingkup yang lebih luas di lingkungan Mesir, yang dapat terjadi di jalanan, rumah, dan kantor.

Sementara itu Nurul Adhha dkk menulis artikel dengan judul “*Strategies and Challenges for Women Protection against Violence: A Case Study of Jakarta and Cairo*”.¹⁷ Dalam artikelnya, Nurul menunjukkan bahwa Mesir telah mereformasi hukum dan kebijakan untuk memberikan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan melalui UUD 2014. Ini menunjukkan Pemerintah Mesir memperhatikan masalah perbedaan gender dalam keterbukaan diri untuk memastikan kesetaraan hak dan kewajiban perempuan tanpa diskriminasi. Namun, implementasi perlindungan perempuan korban oleh pembuat kebijakan dan lembaga negara seperti Kepolisian dan Pemerintah Daerah di Jakarta dan Kairo dinilai kurang baik dan perlu mendapat perhatian lebih agar dapat ditingkatkan. Selain itu, tradisi sosial, budaya, dan doktrin agama juga menjadi penghambat karena masyarakat salah paham dan menganggap kekerasan tersebut sebagai pelanggaran norma. Artikel ini dapat menjadi salah satu referensi bagi penelitian penulis. Namun, Nurul Adhha dkk mengambil studi kasus khusus di Kairo dan Jakarta sedangkan pada penelitian ini penulis fokus pada Mesir, tidak pada ibu kotanya saja tetapi pada beberapa wilayah lainnya di Mesir. Dalam penelitian, penulis membahas keterlibatan UN Women dalam membantu Mesir mengatasi kekerasan terhadap perempuan.

Nevine Henry Wasef dengan artikel jurnal yang berjudul “*Domestic and Social Violence against Women during the Egyptian Uprising*”,¹⁸ menyimpulkan bahwa keadaan ketidakstabilan politik yang muncul setelah Pemberontakan 25 Januari telah menyebabkan kekerasan politik yang dipraktikkan terhadap warga

¹⁷ Nurul Adhha dkk. 2021, *Strategies and Challenges for Women Protection against Violence: A Case Study of Jakarta and Cairo*, Humaniora 33.1, hal. 50-61.
<https://journal.ugm.ac.id/jurnal-humaniora/article/view/58912>

¹⁸ Nevine Henry Wasef. 2018, *Domestic and social violence against women during the Egyptian Uprising*, (Mediterranean journal of social sciences Vol. 9 No. 1, hal. 213).
<https://www.richtmann.org/journal/index.php/mjss/article/view/10155>

negara pada umumnya dan terhadap perempuan pada khususnya. Kekerasan politik telah mendorong juga kekerasan dalam rumah tangga melalui tidak adanya polisi untuk menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Akibatnya, siklus kekerasan politik diperluas hingga mencakup kekerasan sosial terhadap perempuan dan akhirnya menular ke rumah tangga dan keluarga dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Singkatnya, kekerasan dalam rumah tangga dan sosial terhadap perempuan begitu interaktif dan perlu ditelaah dengan mempertimbangkan lingkungan politik yang mendominasi masyarakat dan budaya gender yang mendarah daging. Negara harus mengambil langkah-langkah pencegahan untuk memastikan keselamatan perempuan di dalam negeri dan sosial dengan menerapkan kebijakan baru, mengubah undang-undang saat ini, dan menegakkan kode kesetaraan gender di dalam lembaga-lembaga negara. artikel ini dapat menjadi salah satu referensi penulis, tetapi dalam artikel ini Nevine membahas salah satu kekerasan yang ada di Mesir sedangkan penulis membahas berbagai macam kekerasan seperti; pelecehan seksual di ruang publik, pernikahan dini dan *female genital mutilation* atau mutilasi alat kelamin perempuan (FGM). Dalam penelitian, penulis membahas keterlibatan UN Women dalam membantu Mesir mengatasi kekerasan terhadap perempuan.

2.2 Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan kajian teori Organisasi Internasional dan Feminisme untuk menganalisis “Hambatan Yang Dihadapi UN Women dalam Mengatasi Tindak Kekerasan terhadap Perempuan Mesir Pasca Arab Spring (2017 – 2021)”. Secara garis besar, teori yang akan digunakan dalam menganalisa masalah penelitian ini adalah, sebagai berikut:

2.2.1 Organisasi Internasional

Organisasi internasional menjadi salah satu kajian utama dalam bidang studi hubungan internasional yang berkaitan dengan hubungan para aktor dan tata kelola global, memahami bagaimana dunia diatur. Organisasi internasional awalnya

didirikan dengan tujuan untuk mempertahankan peraturan-peraturan agar dapat berjalan tertib dalam rangka mencapai tujuan bersama dan sebagai wadah hubungan antar bangsa dan negara agar kepentingan masing-masing negara dapat terjamin dalam konteks hubungan internasional.¹⁹

Pengertian organisasi internasional menurut Clive Archer dalam bukunya yang berjudul *International Organization*, berasal dari dua kata yaitu organisasi dan internasional keduanya memiliki arti yang berbeda. Kata internasional memiliki beberapa makna. Pertama, *intergovernmental* yang berarti interstate atau hubungan antar wakil resmi dari negara-negara berdaulat. Kedua, aktivitas antar individu-individu dan kelompok-kelompok di negara lain yang biasanya disebut dengan transnational. Ketiga, hubungan antara perwakilan cabang pemerintah di suatu negara dengan perwakilan cabang dari negara lain, dimana hubungan tersebut tidak melalui jalur kebijakan luar negeri yang biasa disebut *transgovernmental*.

Arti kata organisasi dalam kata international organization sering menjadi permasalahan jika diartikan dengan bentuk tunggalnya (*singular*) yaitu *organization*. *Organization* sendiri memiliki arti sebagai suatu proses sedangkan *international organization* adalah aspek-aspek representatif dari suatu fase dalam proses tersebut yang telah dicapai dalam suatu waktu tertentu.²⁰

Organisasi internasional didefinisikan sebagai suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota (pemerintah dan nonpemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya.²¹ Dalam upaya mendefinisikan suatu organisasi internasional harus pula melihat tujuan yang ingin dicapai, institusi-institusi yang ada, serta bagaimana suatu proses perkiraan peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah terhadap hubungan antara suatu negara dengan aktor-aktor non-negara.²²

¹⁹ A Le Roy Bennet. 1997, *International Organization: Principles and issues*, New Jersey: Prentice Hall Inc, hal. 2-4.

²⁰ Clive Archer. 1983, *International Organization*, London: Allen & Unwin Ltd, hal. 2.

²¹ *Ibid.*, hal 35.

²² Theodore A. Coulumbus dan James H. Wolfe. 1986, *Introduction to international Relations: Power and Justice*, New Delhi: Prentice Hall, hal. 276.

Tujuan dari organisasi itu sendiri adalah untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dengan metode organisasi yang dilakukan secara rutin dengan teknik seperti pembagian tugas dan tugas khusus. Koordinasi ini dapat dijalankan secara formal yang berlangsung dalam struktur resmi dan aparat lembaga, maupun secara informal yang melibatkan sistem praktek yang tidak tertulis dimana unit-unit dalam sistem mempunyai peranan yang berbeda seperti peranan sebagai pemimpin, atau yang dipimpin. Jadi tujuan organisasi internasional diatas mengacu ke arah pembedaan peran informasi dalam lingkup politik dunia.²³

Menurut Le Roy dalam bukunya *International Organization: Principles and Issues*, terdapat dua kelompok organisasi internasional, yaitu: pertama organisasi antar pemerintah (*Inter-Governmental Organizations/IGO*), anggotanya berasal dari perwakilan resmi pemerintah negara-negara. Contohnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), *The United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women* (UN Women). Kedua organisasi non-pemerintah (*Non-Governmental Organization/NGO*), anggotanya berasal dari berbagai kelompok swasta yang berada di bidang keilmuan, keagamaan, kebudayaan, bantuan teknik atau ekonomi, dan sebagainya. Contohnya Palang Merah Internasional (PMI).²⁴

Kedua kelompok organisasi internasional tersebut memiliki karakteristik umum, yaitu sebuah organisasi permanen untuk menjalankan tanggung jawabnya, keanggotaannya bersifat sukarela, instrumen dasar yang menyatakan tujuan, struktur, dan metode pelaksanaannya, badan konsultatif yang representatif, dan sekretariat permanen yang menjalankan fungsi administratif, penelitian, dan informasi.²⁵

Peranan organisasi internasional dalam hubungan internasional dinilai dapat mempengaruhi tingkah laku negara secara tidak langsung dan berhasil dalam memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh suatu negara. Kehadiran organisasi internasional mencerminkan kebutuhan manusia untuk bekerjasama,

²³ Hass dalam James N. Rosenau. 1969, *International Politics and Foreign Policy: A Reader in Research and Theory*, New York: The Free Press, hal.132.

²⁴ A Le Roy Bennet. 1997, *International Organization: Principles and Issues*, New Jersey: Prentice Hall Inc, hal. 2.

²⁵ *Ibid*, hal. 2-3.

sekaligus sebagai sarana untuk menangani masalah-masalah yang timbul melalui kerjasama tersebut.²⁶

Menurut Cliver Archer²⁷ peranan organisasi internasional dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu sebagai berikut;

1. Sebagai instrumen, digunakan oleh negara-negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negerinya.
2. Sebagai arena, tempat bertemu bagi anggota-anggotanya untuk membicarakan dan membahas masalah-masalah yang dihadapi. Tidak jarang organisasi internasional juga digunakan oleh beberapa negara untuk membahas/mengangkat masalah dalam negerinya, ataupun masalah dalam negeri negara lain dengan tujuan untuk mendapat perhatian internasional.
3. Sebagai aktor independen, organisasi internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi.

Selain keutamaan peran, keefektifan peran perlu ditekankan agar tercapai tujuan dari organisasi tersebut. Peran organisasi internasional harus memiliki keefektivitasan agar tercapai cita-cita terwujudnya perdamaian dan kesejahteraan yang menjadi tujuan organisasi internasional. Definisi efektivitas organisasi internasional menurut Frank Biermann dan Steffen Baeuer dapat dilihat menggunakan tiga dimensi yaitu: *output*, *outcome*, dan *impact*. Maksud dari dimensi pertama *output* adalah segala aktifitas yang dilakukan oleh organisasi internasional. Dimensi kedua *outcome* merupakan perubahan perilaku dari faktor masyarakat yang terlibat baik itu masyarakat secara individu, pemerintah maupun media massa. Sedangkan maksud dari *impact* adalah dampak yang dapat dilihat dari adanya perubahan kebijakan yang sesuai dengan tujuan organisasi internasional.²⁸

²⁶ Dr. Anak Agung Banyu Perwira dan Dr. Yanyan Mochamad Yani. 2014, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hal. 95

²⁷ Clive Archer, *op. cit.* hal 130-147.

²⁸ Frank Biermann dan Steffen Baeuer. 2003, *Assessing the Effectiveness of Intergovernmental Organization in International Environmental Politics, Institution Global Environmental Change*, Norwegia: University of East Anglia, Volume 15, hal. 191.

Dalam kaitannya dengan skripsi ini, Penulis akan menganalisa UN Women sebagai Organisasi Internasional yang menjalankan perannya sebagai arena atau forum dimana tindakan akan dilakukan dalam mengakhiri kekerasan terhadap perempuan. UN Women bersama para mitra di Mesir berkumpul untuk berdiskusi dan bekerjasama membahas permasalahan kekerasan terhadap perempuan di Mesir, agar mampu melaksanakan langkah-langkah pencegahan dan respon yang efektif untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan di Mesir.

2.2.2 Teori Feminisme

Kajian feminisme telah menjadi diskusi dari cabang ilmu sosial lainnya seperti politik, sosiologi, ekonomi, antropologi, dan yang lainnya sejak dekade 1950-an. Studi Hubungan Internasional memasuki perspektif gender dalam kajian HI melalui beberapa pakar feminis pada akhir 1980-an dan awal 1990-an. Para pemikir HI memiliki kegelisahan akan adanya dominasi maskulinitas dalam kajian HI, pemikir generasi pertama yaitu, Cynthia Enloe, Cynthia Weber, dan Jean Elsthain mempersoalkan teori-teori yang ada dalam HI yang mengabaikan perspektif perempuan dalam menganalisis berbagai permasalahan internasional.²⁹

Karya Kenneth Waltz, *Man, the State and War*, Jean Elsthain (1995), mempermasalahkan penekanan pada posisi “man” (laki-laki) dan pengabaian peran “women” (perempuan) dalam penyusunan strategi dan kebijakan luar negeri yang menghasilkan analisis yang bernuansa ‘chauvinisme laki-laki’ (male chauvinism).³⁰ Pemikir feminis generasi kedua yaitu, Ann Tickner, Vivienne Jabri, Jill Stearn, Jacqui True, dan yang lainnya menuntut perluasan batas-batas bidang kajian dalam HI dengan lebih melihat dan memasukan perspektif kaum perempuan. Mereka mendorong studi HI untuk mengangkat isu gender dalam berbagai masalah

²⁹ Bob Sugeng Hadiwinata. 2017, *Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, alternatif, dan Reflektif*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hal. 213-214.

³⁰ Jean Bethe Elsthain. 1995, *Feminist Themes and International Relastion*, dalam Stephen Chan dan Cerwyn Moore (ed), *Theories of International Relations Vol. IV: Contemporary Reflexive Approach in International Relations*, London:SAGE, hal. 119.

internasional, seperti gerakan separatis, terorisme, konflik primordial, hubungan ekonomi global, pembuatan kebijakan luar negeri, dan peperangan.³¹

Kata feminisme berasal dari bahasa latin femina kemudian diartikan kedalam bahasa Inggris menjadi feminine yang memiliki arti sesuatu yang berhubungan dengan gadis atau perempuan. Kemudian kata feminine disatukan dengan kata ism (aliran) sehingga menjadi feminism, yang berarti keadaan keperempuanan, atau paham keperempuanan.

Penggunaan kata “feminisme” diperkenalkan untuk pertama kalinya oleh seorang filsuf Prancis Charles Fourier pada tahun 1837, namun secara historis kata feminisme muncul pada tahun 1859 dan terus mengalami perkembangan ke berbagai wilayah di dunia dengan munculnya tulisan-tulisan serta aksi nyata (empiris) partisipasi perempuan. Proses dan perjuangan perempuan dapat menjadi suatu reaksi dari ketidakadilan untuk berjuang demi kesamaan dan kesetaraan akan kesempatan yang sama untuk menentukan kehidupannya sendiri.³²

Feminisme dalam definisi Karen Offen (1988) adalah “suatu teori dan/atau gerakan sosial yang berkaitan dengan upaya peningkatan posisi kaum perempuan melalui cara-cara tertentu untuk mendapatkan hak-hak politik, hukum, dan ekonomi sebagaimana yang didapatkan oleh kaum laki-laki” (*a theory and/or movement concerned with advancing the position of women through such means as achievement of political, legal, and economic rights equal to those granted men*).³³

Sedangkan, feminisme menurut Ani Soetjipto dan Pande Trimayuni dalam bukunya *Gender dan Hubungan Internasional Sebuah Pengantar*, adalah gerakan politik yang minat utamanya adalah hak-hak perempuan dan emansipasi gender.³⁴ Hak perempuan adalah hak asasi manusia. Hak-hak perempuan tidak boleh dilihat sebagai hak khusus: mereka adalah hak asasi manusia yang diabadikan dalam perjanjian hak asasi manusia internasional dan dokumen lainnya, dan termasuk hak-

³¹ *Ibid*, Bab 65, 66, dan 67.

³² Evi Nur Cahyani dkk. 2020, *Manifesto Pendidikan Karakter dan Feminis*, Surabaya: UMSurabaya, , hal. 74 - 93.

³³ Karen Offen. 1988, *Defining Feminism a Comparative Historical Approach*, Journal of Women in Culture and Society Vol.14 No.1, hal.123.

³⁴ Ani Soetjipto dan Pande Trimayuni dkk. 2017, *Gender dan Hubungan Internasional Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Jalasutra, hal. 11

hak seperti kebebasan dari diskriminasi, hak untuk hidup, kebebasan dari penyiksaan, hak atas privasi, akses ke kesehatan, hak atas kondisi kehidupan yang layak, hak atas keselamatan, dan banyak lainnya. Namun demikian, ada juga instrumen hak asasi manusia yang mempertimbangkan situasi khusus perempuan dalam masyarakat dalam mengakses atau menjalankan hak asasi mereka, atau yang bertujuan untuk melindungi mereka dari kekerasan.

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) yang diadopsi pada tahun 1979 oleh Majelis Umum PBB, dan sering digambarkan sebagai undang-undang internasional tentang hak-hak perempuan. Dokumen tersebut menyerukan kepada semua negara anggota PBB untuk mengadopsi langkah-langkah melawan diskriminasi terhadap perempuan di semua bidang kehidupan dan melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan.

Berikut ini terdapat empat periode perjuangan pergerakan para kaum feminis dalam memperjuangkan hak-hak mereka.³⁵ Dalam memperjuangkan hak pilih perempuan dalam pemilihan umum terdapat sebuah gerakan yang dikenal dengan 'gerakan hak pilih atau suffragette movement'. Pada akhir abad ke-19, ini telah menjadi gerakan di seluruh dunia, dan kata-kata 'feminisme' dan 'gerakan feminis' mulai digunakan sejak saat itu. Gelombang pertama aktivisme feminisme ini mencakup demonstrasi massa, penerbitan surat kabar, debat terorganisir, dan pendirian organisasi perempuan internasional. Pada tahun 1920-an, perempuan telah memenangkan hak untuk memilih di sebagian besar negara Eropa dan di Amerika Utara. Pada sekitar waktu yang sama, perempuan menjadi lebih aktif dalam komunis, sosialis dan pesta demokrasi sosial karena semakin banyak perempuan mulai bekerja di luar rumah di pabrik dan kantor. Perempuan pertama kali diizinkan masuk universitas pada awal abad ke-20, memiliki karir dan keluarga. Di negara-negara tertentu, ketika partai-partai fasis memperoleh kekuasaan, gerakan feminis dilarang. Perempuan mulai berorganisasi lagi setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, dan mereka segera memperoleh hak politik yang sama di

³⁵ Council of Europe, *Feminism and Women's Rights Movements*, diakses pada 10 Oktober 2022, [Feminism and Women's Rights Movements \(coe.int\)](https://www.coe.int/t/e/legislation/conventions/Convention_on_the_elimination_of_all_forms_of_discrimination_against_women.pdf)

sebagian besar negara Eropa, dengan emansipasi perempuan menjadi tujuan penting dan sebagian besar perempuan diizinkan untuk mengambil pekerjaan penuh waktu, menceraikan suami mereka dan pergi ke Universitas.

Di Eropa Barat dan Amerika Serikat, gerakan feminis bangkit kembali pada tahun 1970-an. Meskipun feminisme gelombang kedua ini bertujuan untuk mencapai 'pembebasan perempuan', kelompok yang berbeda memiliki ide yang berbeda tentang bagaimana hal ini harus dilakukan. Feminis liberal menginginkan undang-undang kesetaraan yang lebih baik dan reformasi institusi seperti sekolah, gereja, dan media. Feminis radikal berpendapat bahwa akar penyebab ketidaksetaraan perempuan adalah patriarki: laki-laki, sebagai kelompok, menindas perempuan. Mereka juga fokus pada kekerasan terhadap perempuan oleh laki-laki, dan mulai berbicara tentang kekerasan dalam keluarga, dan pemerkosaan. Feminis sosialis berpendapat bahwa itu adalah kombinasi dari patriarki dan kapitalisme yang menyebabkan penindasan perempuan. Gelombang kedua feminisme juga menghasilkan bidang ilmu baru: studi perempuan menjadi disiplin untuk dipelajari di universitas, dan buku-buku mulai diterbitkan tentang pencapaian perempuan dalam sastra, musik dan sains, dan merekam sejarah perempuan yang sebelumnya tidak tertulis. Terakhir, gerakan perempuan memainkan peran penting dalam penyusunan dokumen internasional tentang hak-hak perempuan, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW, 1979).

Gelombang feminisme ketiga terutama mengacu pada gerakan Amerika pada 1990-an, dan merupakan reaksi terhadap reaksi media konservatif dan politisi yang mengumumkan akhir feminisme atau mengacu pada 'pasca-feminisme'. Istilah '*backlash*' dipopulerkan oleh Susan Faludi dalam bukunya "*Backlash. The Undeclared War against Women*", terbit tahun 1991, dan menggambarkan reaksi negatif sistem patriarki terhadap pembebasan perempuan. Ini bukanlah fenomena baru: gerakan perempuan selalu menghadapi antagonisme. Namun, pada 1980-an, bentuk-bentuk serangan yang melembaga terhadap hak-hak perempuan semakin kuat. Feminisme gelombang ketiga dapat ditandai dengan meningkatnya kesadaran akan kategori yang tumpang tindih, seperti ras, kelas, jenis kelamin, orientasi

seksual. Penekanan lebih juga ditempatkan pada isu-isu rasial, termasuk status perempuan di belahan dunia lain (feminisme global). Ini juga merupakan momen ketika sejumlah organisasi non-pemerintah feminis didirikan, tetapi berfokus pada isu-isu feminis tertentu, daripada mengklaim mewakili ide-ide feminis umum. Feminisme gelombang ketiga secara aktif menggunakan media dan budaya pop untuk mempromosikan ide-idenya dan menjalankan aktivitasnya, misalnya dengan menerbitkan blog atau e-zine. Ini berfokus pada membawa feminisme lebih dekat ke kehidupan sehari-hari masyarakat. Isu-isu utama yang menjadi perhatian feminis gelombang ketiga meliputi: pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, kesenjangan gaji antara laki-laki dan perempuan, gangguan makan dan citra tubuh, hak seksual dan reproduksi, kejahatan kehormatan dan mutilasi alat kelamin perempuan.

Cyberfeminism and networked feminism (feminisme gelombang keempat) Istilah cyberfeminism digunakan untuk menggambarkan karya feminis yang tertarik dalam berteori, mengkritik, dan memanfaatkan Internet, dunia maya, dan teknologi media baru secara umum. Istilah dan gerakan itu tumbuh dari feminisme “gelombang ketiga”. Cyberfeminism dianggap sebagai pendahulu dari 'feminisme jaringan', yang secara umum mengacu pada feminisme di Internet: misalnya, memobilisasi orang untuk mengambil tindakan melawan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Salah satu contohnya adalah gerakan online #metoo pada tahun 2017, yang merupakan respon di jejaring sosial dari perempuan di seluruh dunia atas kasus Harvey Weinstein, seorang produser Hollywood yang dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap staf perempuan di industri film.

Terdapat lima prinsip dasar teori feminis, yaitu; ³⁶ pertama, bekerja untuk meningkatkan kesetaraan: pemikiran feminis menghubungkan ide dengan tindakan, melalui banyak aksi yang ditujukan untuk berjuang mendorong perubahan dan menumbuhkan kesadaran masyarakat akan kesetaraan gender. Kedua, memperluas pilihan manusia: kaum feminis memiliki keyakinan bahwa laki-laki maupun

³⁶ Claudia F, *What is Feminist Theory? - Definition & Overview*. (2015, August 26). Diupdate pada 16 September 2021, diakses pada 7 Februari 2022, <https://study.com/academy/lesson/what-is-feminist-theory-definition-lesson-quiz.html>.

perempuan, harus diberikan kebebasan untuk mengembangkan minat dan bakatnya tanpa melihat dari jenis kelamin mereka.

Prinsip feminis yang ketiga, yaitu menghilangkan stratifikasi gender: Kaum feminis menentang hukum serta norma budaya yang menciptakan ketidaksetaraan gender di masyarakat dengan membatasi pendapatan, pendidikan, partisipasi politik, dan kesempatan kerja bagi perempuan. Terakhir, mengakhiri kekerasan seksual (sexual violence) dan mempromosikan kebebasan seksual (sexual freedom): Kaum feminis merasa bahwa perempuan harus memiliki kuasa atas dirinya dalam mengontrol seksualitas dan reproduksi yang dimiliki tanpa izin dan ancaman dari laki-laki.

Terdapat enam teori feminisme, sebagai berikut:³⁷ Teori Feminisme Liberal berfokus pada peran gender yang dilarang, pembagian kerja patriarki dalam pekerjaan dan keluarga, dan dampak peran gender pada kesetaraan sosial, hukum, politik, dan ekonomi. Premis teoritis feminisme liberal didasarkan pada teori kontrak sosial abad ke-16 dan ke-17, yang berarti bahwa hak-hak alami dan hukum perempuan harus dilindungi untuk memelihara masyarakat yang terorganisir. Feminis liberal berpendapat bahwa perempuan sama dengan laki-laki karena mereka berdua memiliki kapasitas yang menjadi sifat manusia untuk penalaran dan agensi moral. Salah satu bidang utama yang ditekankan oleh para ahli teori feminis liberal adalah kesetaraan, kesempatan, khususnya kesetaraan gender dalam hal pendidikan, ekonomi, dan politik. Selain itu, mereka fokus pada hak asasi manusia universal, restrukturisasi pembagian kerja dalam hukum, pekerjaan, lingkungan keluarga, penerimaan individualisme, dan pilihan pribadi.

Teori Feminisme Marxis Tradisional (Traditional Marxist) menempatkan asal mula penindasan perempuan bukan dalam peluang individu tetapi melekat dalam organisasi dan struktur politik serta ekonomi masyarakat. Pandangan ini berpendapat bahwa posisi perempuan dalam masyarakat berawal dari perkembangan kepemilikan pribadi, kapitalisme, dan hegemoni kelas penguasa. Feminis Marxis berpendapat bahwa gender dan ketidakadilan kelas saling terkait

³⁷ Alana Van Gundy. 2013, *Feminist Theory, Crime, and Social Justice*, Oxford: Anderson Publishing, hal. 2 - 4

bahwa pengalaman penindasan perempuan harus dipahami sebagai hubungan kekuasaan langsung antara perempuan dan laki-laki. Feminis Marxis percaya, misalnya, bahwa seorang perempuan yang bekerja di dalam rumah merupakan bentuk perbudakan domestik, bahwa pekerjaan perempuan diberikan kompensasi yang rendah sebagai alat kontrol dan penindasan, dan selama struktur masyarakat didasarkan pada prinsip-prinsip kapitalis, perempuan akan tetap menjadi kelas minoritas.

Teori Feminisme Radikal mengidentifikasi dominasi laki-laki, atau patriarki, sebagai akar dari ketidaksetaraan gender. Feminis radikal berfokus pada organisasi sosial, penindasan gender dan struktural, bentuk kekerasan terbuka dan terselubung terhadap perempuan. Perbedaan utama antara teori feminis radikal dan bentuk lain dari teori feminis yaitu pada ikatan eksplisit dengan patriarki dan kekerasan terhadap perempuan, dan solusi yang disarankan seperti penolakan individu dan masyarakat terhadap patriarki, penekanan dengan berdiri bersama sebagai perempuan, dan pentingnya perempuan mempelajari kekuatan, kemandirian, dan mengetahui nilai mereka. Gerakan yang terkait dengan feminisme radikal antara lain Black is Beautiful, kampanye persaudaraan Dove, dan Women Stand Together.

Feminisme Radikal menganggap bahwa tidak hadirnya perempuan dalam kajian HI adalah relasi dari kuasa yang bersifat subordinatif dan didominasi antara laki-laki dan perempuan. Bagaimana dunia ini diatur dan bagaimana tatanan masyarakat ini dibentuk berpangkal dari ideologi patriarki yang lebih memomorsatukan kepentingan dan peran salah satu jenis kelamin tertentu, yaitu laki-laki. Bentuk kontrol terhadap seksualitas perempuan, peran-peran reproduksi dan peran perempuan secara umum dalam masyarakat.³⁸ Dalam buku yang ditulis oleh Carol Hanisch yang berjudul *Notes from the Second Year* (1970) terdapat slogan "(Yang) personal itu politis". Hanisch berpendapat bahwa perbedaan antara lingkup publik dan privat adalah keliru.³⁹ Slogan ini menjelaskan bagaimana posisi

³⁸ Ani Soetjipto dan Pande Trimayuni (ed.), hal. 37.

³⁹ Maggie Humm. 2002, *Ensiklopedia Feminis*, terj. Mundi Rahayu Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, hal. 338.

perempuan (sebagai entitas personal) yang dibentuk secara politis untuk menempati ruang-ruang privat, sementara laki-laki di ruang publik yang membuat keputusan.

Teori Feminisme Sosialis berpendapat bahwa pemahaman yang mendalam tentang Marxisme harus dianut dan bahwa perluasan teori radikal dan Marxis diperlukan untuk lebih memahami persimpangan gender, kelas, dan integrasi antara keduanya. Teori feminis berbasis sosialis fokus pada gender dan kelas, tetapi tidak seperti teori Marxis, yang menempatkan kelas sebagai variabel yang paling penting, feminis sosialis memandang gender dan kelas sama pentingnya. Kerangka kerja ini memandang hubungan antara kelas dan gender sebagai timbal balik dan berbeda dari teori feminis Marxis, yaitu: sosialis memperluas makna kondisi material untuk mencakup lebih dari sekadar cara produksi barang (seperti penggunaan tubuh manusia dan produksi pengetahuan), menekankan subjektivitas manusia, menganalisis variabel yang saling terkait (kelas, politik, ekonomi, dll), dan menyarankan solusi yang berbeda untuk perubahan (Marxisme menyerukan akhir dari kapitalisme dan feminis sosialis menyerukan mobilisasi sadar untuk meningkatkan kondisi tingkat makro dan mikro).

Teori Feminisme Postmodern berpendapat bahwa seks dan gender dikonstruksi secara sosial sebagai turunan dari bahasa. Menurut sudut pandang teoretis ini, cita-cita, norma, dan kategorisasi gender dikonstruksi secara sosial dan diberi label oleh masyarakat. Yang menarik bagi feminis postmodern adalah siapa yang menciptakan, mendefinisikan, dan menafsirkan label dan kategori perbedaan ini. Postmodern menolak kategorisasi, "kebenaran" hitam dan putih, dan istilah atau konsep seperti kejahatan, penyimpangan, kontrol sosial, dan keadilan sebagai yang diciptakan secara sosial dan bukan "kebenaran" universal. Mereka mendukung memindahkan pemahaman gender ke pusat fokus, mendekonstruksi penelitian dan pengetahuan yang berfokus pada perempuan, dan mempertimbangkan kategori yang meremehkan atau meminggirkan satu gender dalam kaitannya dengan yang lain.

Terakhir, Teori Feminisme Kritis Terkait dengan Ras (*Critical race feminism*) merupakan persimpangan gender dan ras. Ahli teori ras kritis fokus pada posisi subordinat "ganda" yang dipegang oleh perempuan kulit berwarna dalam

masyarakat. Dengan kata lain, perempuan sebagai sebuah kelas tertindas di ranah profesional dan pribadi (akses ke peluang kepemimpinan, pelecehan seksual, diskriminasi, dan seksisme), dan perempuan kulit berwarna menghadapi hambatan penindasan terkait gender dan ras, seperti rasisme dan diskriminasi minoritas.

Kekerasan terhadap perempuan lazim terjadi secara global, termasuk di Mesir dan tidak spesifik pada sistem politik atau ekonomi tertentu. Jacqui True (2012) telah menunjukkan hubungan antara kekerasan terhadap perempuan di ruang privat (misalnya, kekerasan dalam rumah tangga) dan jenis-jenis kekerasan yang dialami perempuan di depan umum, di tempat kerja yang semakin mengglobal dan di masa perang. Singkatnya, tidak ada perempuan yang memiliki hak ekonomi, politik atau sosial yang sama dengan laki-laki dan di mana-mana ada bentuk kekerasan gender yang lazim, apakah terjadi kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan seksual dalam konflik.⁴⁰

Pemerksaan terhadap perempuan adalah salah satu bentuk kekerasan dalam konflik, feminis meyakini pemerksaan sebagai tindakan teror politik terhadap kelompok tertindas. Maggie Humm mendefinisikan pemerksaan sebagai tindakan dan institusi sosial yang melanggengkan dominasi patriarki yang didasarkan pada kekerasan.⁴¹ Pada masa konflik, pemerksaan digunakan untuk membungkam perempuan yang aktif dalam pergerakan dan diplomasi.⁴² Selain itu pemerksaan juga dilakukan terhadap perempuan karena mereka memiliki peran sosial dalam masyarakat.

Hal ini terjadi pada aktivis perempuan Mesir yang berada di garis depan dalam upaya untuk mengubah sistem politik Mesir dalam Revolusi Arab Spring. Pada 9 Maret 2011, kurang dari sebulan setelah penggulingan Presiden Hosni Mubarak, para pengunjuk rasa kembali ke *Tahrir Square* untuk menyatakan frustrasi dengan lambatnya reformasi. Militer Mesir membubarkan demonstrasi dan

⁴⁰ Sarah Smith, *Introducing Feminism in International Relations Theory*, diakses pada 7 September 2022, [Introducing Feminism in International Relations Theory \(e-ir.info\)](#)

⁴¹ *Ibid*, hal. 388-389.

⁴² Meredith Turshen. 2001, *The Political Economy of Rape: An Analysis of Systematic Rape and Sexual Abuse of Women During Armed Conflict in Africa*, dalam *Victims, Perpetrators or Actors? Gender, Armed Conflict and Political Violence*, London: Zed Books, hal 55-68.

menangkap demonstran, termasuk setidaknya 18 perempuan. Para perempuan ini dipukuli, didakwa dengan prostitusi, dan dipaksa untuk tunduk pada "pemeriksaan keperawanan". Dalam masyarakat agama patriarki di mana seksualitas perempuan sangat diawasi, tuduhan pergaulan bebas berfungsi untuk merusak reputasi pengunjung rasa perempuan. Insiden serupa terus berlanjut selama transisi Mesir, ketika pasukan keamanan Mesir menangkap jurnalis Mesir-Amerika Mona Eltahawy selama protes November 2011 terhadap militer di *Tahrir Square*, mereka memukulnya dengan kejam dengan mematahkan banyak tulangnya dan menyerangnya secara seksual. Sementara ketenaran Eltahawy sebagai jurnalis Amerika menjadikan dia dapat bebas dengan cepat.

Kekerasan seksual terhadap pengunjung rasa perempuan oleh pasukan keamanan Mesir mencerminkan kekerasan seksual terhadap perempuan sebagai reaksi putus asa dari kelompok elit kuat yang terkait dengan para pemimpin otoriter dan diktator yang dengan cepat kehilangan kekuasaan dan relevansi. Kekerasan seksual terhadap perempuan telah digunakan sebagai alat untuk menghukum atau mengintimidasi mereka dalam perubahan politik. Yang paling mengerikan dari alat penindasan politik ini yang digunakan untuk mengendalikan perempuan adalah pemerkosaan. Reformasi yang terjadi dimaksudkan untuk mencegah pemerkosa melarikan diri dari hukuman, namun kasus diatas telah menjadikan kekerasan seksual terhadap perempuan sebagai instrumen penindasan politik yang kuat.⁴³

Aktivis feminis adalah pendorong perubahan kebijakan yang paling konsisten dan penting untuk memerangi kekerasan terhadap perempuan.⁴⁴ Meskipun agenda kebijakan kesetaraan gender sangat penting untuk melembagakan tuntutan feminis, dampaknya terhadap kebijakan tergantung pada kehadiran gerakan otonom yang kuat. Aktivisme feminis independen menempatkan status dan kesejahteraan perempuan sebagai prioritas utama mereka untuk bertindak, daripada

⁴³ Elizabeth Marcus, *Rape and the Arab Spring The Dark Side of the Popular Uprisings in the Middle East*, Center for American Progress, December 2011. Diakses pada 27 September 2022, [Rape and the Arab Spring - Center for American Progress](#)

⁴⁴ S. Laurel Weldon & Mala Htun. 2013, *Feminist mobilisation and progressive policy change: why governments take action to combat violence against women*, *Gender & Development*, 21:2, hal. 231-247.

menurunkannya untuk dipertimbangkan pada suatu waktu nanti di masa depan. Ini menghasilkan pengetahuan sosial tentang posisi perempuan sebagai kelompok dalam masyarakat, menantang peran gender, dan memprioritaskan masalah kesetaraan gender dengan membentuk agenda nasional dan internasional, menuntut reformasi kelembagaan, dan berinovasi dalam bentuk-bentuk baru organisasi sosial untuk kesetaraan gender. Akibatnya, aktivisme feminis mempromosikan reformasi hukum yang kritis dan pendanaan untuk memerangi kekerasan terhadap perempuan di tingkat lokal, serta menggeser dinamika dan memperluas masalah yang dibahas untuk proses perdamaian yang lebih efektif.⁴⁵

Pemerintah harus mengakui bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah masalah serius. Ini harus mengintensifkan upaya untuk mencegah kekerasan, melindungi para penyintas dan menyelidiki serta mengadili para pelaku. Langkah-langkah harus diambil untuk menangani kekerasan terhadap perempuan secara komprehensif dalam menjalani kehidupan yang bebas dari kekerasan, tetapi juga mendasar untuk memungkinkan partisipasi perempuan dalam menentukan masa depan mereka.⁴⁶

Dalam kaitannya dengan skripsi ini, penulis akan menggunakan teori feminisme liberal dan feminisme radikal, teori ini di pilih untuk dapat menjelaskan analisa dari permasalahan yang ada tentang kekerasan terhadap perempuan serta hambatan yang di hadapi UN Women dalam mengakhiri kekerasan terhadap perempuan di Mesir. feminisme radikal mengidentifikasi dominasi laki-laki, atau patriarki, sebagai akar dari ketidaksetaraan gender. Tubuh perempuan sebagai objek utama penyiksaan oleh kekuasaan laki-laki, seperti kekerasan terhadap perempuan. Sedangkan, para ahli teori feminis liberal, berfokus pada peran kesetaraan, kesempatan, khususnya kesetaraan gender, serta dampak peran gender pada kesetaraan sosial, hukum, politik, dan ekonomi. Hal ini sejalan dengan faktor yang

⁴⁵ PeaceWomen, Does Feminist Movement-Building Reduce Violence Against Women?, diakses pada 24 September 2022, [Does Feminist Movement-Building Reduce Violence Against Women? | PeaceWomen](#)

⁴⁶ Katie Booth, Salma El Hussein. 2014, *Egypt: Keeping women out Sexual violence against women in the public sphere*, FIDH, Nazra for Feminist Studies, New Woman Foundation, The Uprising of Women in the Arab world, hal. 10

menjadi alasan mengapa kekerasan terhadap perempuan masih terjadi di Mesir, yaitu adanya budaya atau pandangan patriarki serta masalah kesetaraan gender yang ada di kalangan masyarakat Mesir

2.3 Kerangka Berpikir

